

Analisis Kesesuaian Penerima dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang, Aceh Selatan

Suci Fitria Citra

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh
e-mail: 170205036@student.ar-raniry.ac.id

Tari Muzalifah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh
e-mail: 170205008@student.ar-raniry.ac.id

Lukman Ibrahim

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh
e-mail: lukman.ibrahim@ar-raniry.ac.id

Abstract

This research aims to describe the accuracy in the distribution of social assistance during Covid-19 to the people of Gampong Sapik and Air Berudang. It uses a case study with a qualitative approach. Data collection was carried out by observation, interview, and analysis using thematic techniques. The distribution of social assistance has received a positive response from the community because it can help the economy of residents in the midst of the Covid-19 pandemic, even though there are several polemics that have occurred due to incorrect data used and several other obstacles. Based on the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 54 / HUK / 2020 regarding the Implementation of Basic Food Social Assistance and Social Cash Assistance in Handling the Impact of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), the Government realizes social assistance to people affected by Covid-19 which involves the Central Government, regional governments and heads of villages in distributing it to the community.

Keywords: *Covid-19; BST; Sembako; BLT; polemik*

A. Pendahuluan

Dunia saat ini sedang dilanda pada kepanikan yang begitu luar biasa terhadap virus yang mematikan yang sebelumnya belum pernah ada. Penyebaran virus ini begitu

cepat bahkan Indonesia pun ikut merasakan dampak dari virus ini. Virus ini dikenal dengan nama virus corona. *Coronaviruses* (CoV) merupakan keluarga dari virus yang menyebabkan flu hingga penyakit berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV). Penyakit yang disebabkan oleh virus ini lebih familiar disebut Covid-19. Penyakit ini pertama kali muncul dan menyerang manusia di Provinsi Wuhan, China pada tahun 2019. Dengan gejala awal serupa sakit flu pada umumnya. Gejala tersebut diantaranya batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Virus corona berbeda dengan virus flu pada umumnya. Virus ini berkembang begitu cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Infeksi ini akan terjadi pada pasien yang memiliki penyakit bawaan.¹

Virus ini tidak hanya menyebar di China, bahkan menyebar secara masif disejumlah negara termasuk Indonesia juga merasakan dampak dari Corona. Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus virus corona pertama yang menjangkit 2 orang yaitu ibu dan anaknya yang tinggal di daerah Depok, Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2020.² *World Health Organization* (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.³ Data terupdate yang dilaporkan pertanggal 13 November 2020 di Indonesia diketahui bahwa jumlah orang yang diperiksa sebanyak 3.249.484 orang, dengan jumlah terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 457.75 orang, sembuh (positif Covid-19) sebanyak 385.094 orang, meninggal (positif Covid-19) sebanyak 15.037 orang dan negatif Covid-19 sebanyak 2.791.749 orang. Perkembangan kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia dapat dilihat pada bagan di bawah.⁴

¹ Nailul Mona, "Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek *Contagious* (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)". *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 2, No.2, 2020, h. 117.

² Wildan Rahmansyah dkk, "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia", *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 2, No.1, 2020, h. 91.

³ Maman Suryaman dkk, "Covid-19 Pandemic and Home Online Learning System: Does it Affect the Quality of Pharmacy School Learning?" *Journal of Systematic Reviews in Pharmacy*, Vol. 11, Issue 8, 2020, h. 524.

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Situasi Terkini Perkembangan Novel CoronaVirus (Covid-19) Data Dilaporkan Sampai 13 November 2020", https://covid19.kemkes.go.id/download/Situasi_Terkini_141120.pdf (diakses pada 14 November 2020 pukul 09.44).



Melihat fakta bahwa Covid-19 ini merebak begitu pesat dan menjadi pandemi menyebabkan pemerintah Indonesia terdorong untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan dalam penanganan Covid-19 ini. Dengan berbagai pertimbangan Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang berlaku sejak 1 April 2020. Lingkup PSSB ini mencakup peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan di fasilitas atau tempat umum, pembatasan kegiatan agama, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan khusus lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.⁵

Berbagai sektor ikut terganggu dengan adanya Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 ini. Salah satu sektor yang terganggu akibat adanya virus ini adalah sektor ekonomi. Prediksi dari Doorn ekonom senior World Bank menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan berada di bawah 5% bahkan bisa tidak tumbuh sama sekali atau 0% akibat pandemi ini. Dari segi ekonomi

⁵ Vincentius Gityarko, "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19" <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19> (diakses pada 14 November 2020 pukul 09.58).

rumah tangga pun juga mengalami dampak dari wabah ini. Menteri Keuangan menyatakan pandemi ini mempengaruhi laju konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Sementara Sekretaris Kemenko Perekonomian menyatakan sebanyak 3,05 juta orang pekerja di Indonesia yang terdampak PHK dan dirumahkan akibat pandemi ini. Efek lanjutan diperkirakan akan bertambahnya jumlah pengangguran.⁶

Para pekerja yang bekerja diluar rumah tentu sangat merasakan dampak dari Covid-19 ini. Pekerja dipaksa untuk tidak bekerja padahal kebutuhan rumah tangga sangat banyak. Hal yang terjadi bagi para penjual akibat adanya pandemi ini adalah berkurangnya pembeli yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh. Bagi para penjual jasa seperti menjahit, transportasi umum juga merasakan dampaknya seperti merosotnya orderan jahitan dan tidak adanya yang menggunakan jasa angkutan umum. Para petani pun ikut merasakan dampak dari Covid-19 ini, meskipun mereka tetap bisa bekerja di sawah tapi ekonomi mereka tetap melemah karena harga penjualan hasil kebunnya menurun drastis dan pembeli hasil kebun juga berkurang. Perias pengantin juga merasakan dampak ini, karena tidak adanya acara yang diadakan pada masa pandemi Covid-19. Dan berbagai lini pekerjaan ikut merasakan dampak dari pandemi ini yang menyebabkan lemahnya ekonomi warga.

Sebagai usaha dalam menangani dampak dari pandemi Covid-19 dalam sektor ekonomi, Pemerintah Indonesia menyiapkan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya masyarakat menengah ke bawah. Hal ini termuat dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).⁷ Bantuan sosial yang diberikan ini dapat membantu permasalahan ekonomi yang dialami warga Indonesia, khususnya dalam penulisan ini warga Gampong Air Berudang dan Gampong Sapik. Akan tetapi dalam proses pembagian bantuan sosial ini terdapat berbagai polemik yang disebabkan karena data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak valid, seperti data warga yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Selain itu juga ada data warga yang dulunya petani sekarang sudah menjadi perangkat gampong atau yang dulunya honorer sekarang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap

⁶ Peter Garlans Sina, "Ekonomi Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-19", *Jourak of Management (SME's)*, Vol. 12, No.2, 2020, h. 240.

⁷ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/ HUK/ 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial, Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*(Covid-19) <https://www.google.com/url...>(diakses pada 14 November 2020 pukul 10.16).

mendapatkan bantuan sosial. Karena itu, Kementerian Sosial menggunakan data lama, sehingga penerimaan bantuan sosial ini tidak tepat sasaran kepada warga yang benar-benar terdampak Covid-19.⁸

Setelah bantuan sosial ini dibagikan kepada warga, pemerintah berharap agar warga yang menerima bantuan sosial ini menggunakan dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Tapi ada oknum yang menggunakan dana ini untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Hal ini bisa saja terjadi karena bantuan sosial diberikan kepada penerima yang tidak tepat sasaran. Dalam proses penyaluran bantuan sosial ini pun ada keterlambatan yang terjadi yang menyebabkan keributan antar warga dengan perangkat gampong karena warga tidak mengetahui titik permasalahan dari keterlambatan yang terjadi. Warga hanya ingin mendapatkan bantuan sosial tanpa mengetahui proses hingga bantuan sosial itu cair dan sampai ke tangan mereka.

Walaupun praktik keagamaan masyarakat di Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang relatif baik, namun pemaknaan firman Allah SWT. "... Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar" (Q.S. Al-Baqarah : 153) sudah mulai agak kurang "merasuk" ke dalam jiwa mereka sehingga memperkuat peluang kemunculan beberapa permasalahan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan di atas dan mencari titik terang dari permasalahan serta kesesuaian penggunaan dana bantuan sosial oleh masyarakat. Sehingga penelitian ini berjudul "Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Bantuan Sosial Masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang Kabupaten Aceh Selatan pada Masa Pandemi Covid-19".

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di Gampong Air Berudang dan Gampong Sapik pada Bulan Oktober-September 2020. Instrumen pengumpulan data meliputi pedoman wawancara yang berguna untuk memperoleh informasi terkait dengan kesesuaian penerima dan pemanfaatan bantuan. Instrumen selanjutnya adalah pedoman observasi yang berguna untuk mengamati keadaan dalam penyaluran dan pemanfaatan bantuan. Instrumen

⁸ Anisa Mufida, "Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengan Pandemic Covid-19", *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4, No.1, 2020, h.164.

pendukung dalam penelitian ini meliputi alat perekam dan kamera yang berguna untuk merekam percakapan peneliti dengan responden dan mendokumentasikan hal-hal yang diperlukan. Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan 2 cara, yaitu wawancara dan observasi. Data dianalisis secara tematik didasarkan pada tema-tema yang ditemukan di dalam penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jenis, Sumber, dan Besaran Bantuan Sosial Selama Covid-19

Bantuan Sosial yang disalurkan Pemerintah kepada masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang selama Covid-19 ini ada beberapa jenis, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong (BLTDD). Dana dari bantuan-bantuan tersebut disalurkan oleh beberapa sumber yaitu BST diberikan oleh Pemerintah Pusat atau dari dana APBN, Sembako diberikan oleh Pemerintah Daerah atau dari dana APBA dan APBK, dan BLTDD diberikan oleh Pemerintah Gampong atau dari dana Gampong yang anggarannya juga dari APBN.

Bantuan sosial jenis BST itu disalurkan mulai dari bulan April dan sampai November ini, bahkan kemungkinan akan diperpanjang sampai bulan Desember. Dari April, Mei, dan Juni banyak dana yang diberikan setiap bulannya adalah Rp600.000 untuk setiap KPM. Dari Juli, Agustus, dan September banyak dana yang diberikan setiap bulannya adalah Rp300.000 untuk setiap KPM, dan ini akan berlanjut sampai Desember nanti.⁹

Untuk bantuan sosial jenis BLTDD itu hampir sama seperti BST, tetapi penyalurannya hanya selama 6 bulan saja yang dimulai dari April sampai September dikarenakan Dana Gampong itu terbatas. Untuk 3 bulan awal penyaluran yaitu April, Mei, dan Juni, banyak dana yang diberikan setiap bulannya untuk setiap KPM adalah Rp600.000. Kemudian untuk 3 bulan selanjutnya yaitu Juli, Agustus, dan September itu sebanyak 50% dari sebelumnya yaitu Rp300.000, hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.¹⁰

Bantuan dari APBA yang disalurkan kepada masyarakat itu berupa satu paket Sembako yang berisi 5kg beras, 1 kotak Mie instan, 2kg gula pasir, 2 liter minyak makan, 4 kaleng sarden yang jika diuangkan senilai Rp200.000. Dari APBK juga

⁹ Sumber data dari Tim TKP2K Aceh.

¹⁰ Sumber data dari Ketua Humas Gampok Sapik dan Bendahara Gampong Air Berudang.

menyalurkan satu paket sembako yang sama seperti paket sembako yang disalurkan dari APBA. Bantuan Sembako ini hanya sekali disalurkan oleh Pemerintah kepada masyarakat selama Covid-19 baik dari APBA maupun dari APBK.¹¹

2. Kriteria dan Basis Data Penerima Bantuan Sosial Selama Covid-19

Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap penerima bantuan sosial selama Covid itu berbeda-beda. Untuk penerima BST, syaratnya tidak menerima PKH dan BPNT yang merupakan bantuan sosial yang telah disalurkan Pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu jauh sebelum adanya Covid-19 ini, juga bukan penerima bantuan dari APBD Provinsi dan Kabupaten yaitu bantuan berupa Sembako.

Untuk penerima BLTDD, syaratnya yaitu penerima bukan Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Kontrak Pemerintah, Pegawai Kontrak Swasta, TNI/POLRI, Kepala Gampong dan Perangkat Gampong, serta bukan penerima bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT, KIS, KIP atau yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah, Kabupaten, Provinsi, Pusat, dan lain-lain. Data penerima BST itu diambil dasarnya dari BDT/DTKS, dan data penerima BLTDD itu ditentukan oleh Geuchik dengan melakukan musyawarah Gampong.

Sedangkan untuk bantuan Sembako itu dulu syaratnya agak umum yaitu para pekerja yang terdampak Covid-19 langsung, contohnya pedagang pinggir jalan seperti yang jualan martabak, batagor, dan sebagainya. Tetapi karena Covid-19 sehingga tidak memungkinkan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data maka akhirnya dari Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama yang diusul oleh Geuchik kemudian dikirimkan ke Provinsi. Inilah yang menjadi data penerima bantuan Sembako dari Pemerintah. Syarat penerima bantuan Sembako ini juga bukan penerima bantuan sosial jenis lainnya.

3. Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial Selama Covid-19

Bantuan sosial jenis BST selama Covid-19 ini disalurkan kepada masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang di mulai dari bulan April lalu sampai sekarang, dan akan diperpanjang sampai Desember nanti. Penyaluran BST ini dilakukan setiap bulan. BST disalurkan Pemerintah kepada masyarakat melalui Kantor Pos. Setiap KPM penerima BST harus mendatangi Kantor Pos untuk mengambil bantuan tersebut dengan menandatangani kertas sebagai tanda terima dan bukti bahwa benar KPM tersebut telah menerima BST.

¹¹ Sumber data dari Kepala Dinas Sosial Aceh Selatan.

Bantuan sosial jenis BLTDD yang disalurkan kepada masyarakat juga dimulai dari bulan April lalu, tetapi penyalurannya hanya sampai September. BLTDD ini juga disalurkan setiap bulan. Penyaluran BLTDD ini disalurkan langsung oleh Pemerintah Gampong kepada KPM penerima BLTDD. Warga dapat mengambil bantuan tersebut ke Kantor Gampong dan mengikuti proses pengambilannya sesuai dengan arahan dari petugas yang mengurus bantuan tersebut.

Berbeda dengan BST dan BLTDD, bantuan jenis Sembako selama Covid-19 ini hanya sekali yang disalurkan oleh Pemerintah kepada masyarakat. Proses penyaluran sembako ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Gampong untuk dibagikan langsung kepada KPM penerima Sembako. Untuk proses pembagiannya di Gampong Sapik, pengurus bantuan tersebut membagikan langsung ke rumah warga yang menerima bantuan sembako. Sedangkan di Gampong Air Berudang, KPM penerima Sembako diminta mengambil langsung ke Kantor Gampong sesuai dengan arahan petugas yang menangani proses pembagian tersebut.

4. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Selama Covid-19

Bantuan sosial yang diberikan Pemerintah sangat membantu masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang terlebih dikalangan masyarakat yang memang kondisi ekonominya lemah. Karena Covid-19 ini tidak hanya berpengaruh buruk terhadap kesehatan tetapi juga mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Hampir semua pekerjaan terhambat karena tidak diperbolehkan adanya kerumunan, harga barang penjualan turun, pekerjaan sulit didapat, sehingga penghasilan masyarakat menjadi menurun.

Namun dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, walaupun tidak sepenuhnya dapat menutupi kebutuhan setidaknya bantuan ini dapat sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat. Dana tersebut dapat membantu masyarakat untuk menopang kebutuhan sehari-harinya seperti membeli bahan dapur, stok makanan, dan keperluan lainnya yang bersifat ketahanan pangan untuk persediaan selama Covid-19 ini.

5. Penyebab Keributan dalam Penyaluran Bantuan Sosial Selama Covid-19

Dalam proses pembagian bantuan sosial selama Covid-19 terjadi beberapa polemik antara masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang dengan

Pemerintah Gampongnya dikarenakan adanya kesalahpahaman dari masyarakat tentang informasi bantuan sosial tersebut dan ada beberapa kendala lainnya.

Salah satu penyebab keributan di masyarakat mengenai bantuan sosial selama Covid-19 ini adalah karena adanya penerima bantuan sosial yang dianggap tidak tepat sasaran, seperti adanya data penerima bantuan sosial yang sudah meninggal, adanya data penerima yang seharusnya tidak menerima bantuan tersebut, dan kejanggalan-kejanggalan lainnya. Hal ini dikarenakan proses pembaharuan data yang kurang *update*. Di awal-awal pembagian bantuan sosial ini Pemerintah menggunakan data yang bukan *update* terkini disebabkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan survei ke lapangan karena Covid-19 dan juga karena proses penyiapan data penerima bantuan sosial tersebut dilakukan secara terburu-buru, serta pemerintah juga baru beradaptasi dengan keadaan yang disebabkan oleh Covid-19 ini, sehingga banyak terjadi kesalahan ketika penyaluran bantuan sosial tersebut di lapangan. Namun semakin ke depan, Pemerintah mulai melakukan pembaharuan data *se-update* mungkin agar penyaluran bantuan sosial selama Covid-19 sesuai dengan sasaran yang ditujukan.

Pihak dinas sosial khususnya dalam hal ini Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan verifikasi ulang terhadap data PKM melalui Petugas Registrasi Gampong (PRG). Bagi warga yang tidak terdaftar di BDT dapat membawa Kartu Keluarga ke kantor gampong nanti dari pihak PRG akan mendaftarkannya. Layak atau tidak layaknya data dari gampong itu tergantung pada PRG nya. Kalau PRG itu ada merubah datanya maka jalan lah datanya. Kalau tidak diperbaharui oleh PRG itu datanya akan selalu sama. Update data itu dilakukan 3 bulan sekali atau minimal 2 kali dalam setahun oleh PRG. Update minimal itu dilakukan bulan November dan April.

Keterlambatan penyaluran bantuan sosial itu terjadi karena Pemerintah belum tahu bagaimana cara mensinkronkan data, mengkoordinasikan data baik dalam Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau sampai ke Gampong. Kemudian Pemerintah juga masih dalam masa persiapan yang belum begitu maksimal. Tim TKP2K harus melakukan sesuatu yang cepat tapi harus tepat sasaran sehingga hal tersebut tidak berjalan dengan sempurna karena waktu yang diberikan terlalu singkat untuk mempersiapkan data yang akurat.

Penggunaan dana bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu tidak hanya digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan pangan saja selama pandemi, tetapi ada juga sebagian warga yang menggunakan dana tersebut

untuk kebutuhan sekunder atau sesuatu yang tidak terlalu penting. Hal ini bertentangan dengan tujuan dibagikannya bantuan sosial yaitu pemerintah membagikan bantuan itu agar masyarakat bisa bertahan dalam keadaan pandemi ini, warga diharapkan menggunakan dana dari bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan atau keperluan lain yang memang penting.

Warga yang mendapatkan bantuan sosial itu syaratnya adalah warga tersebut bukan penerima bantuan sosial lain selain yang akan diberikan dan juga bukan Pegawai BUMN/BUMO, Pegawai Kontrak Pemerintah, Pegawai Kontrak Swasta, TNI/POLRI, Kepala Gampong dan Perangkat Gampong. Karena syarat tersebut, maka dapat kita temui dilapangan bahwa ada warga yang bisa dikatakan lumayan mampu tetapi mendapat bantuan sosial selama Covid-19 ini. Hal tersebut dikarenakan syarat penerimanya tidak dilihat dari mampu atau kurang mampu warga tersebut.

Untuk warga yang lumayan mampu tetapi mendapat bantuan ini banyak menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak terlalu penting, seperti membeli baju, membeli paket data atau pulsa HP untuk anak, membeli makanan untuk pemuasan pribadi (misalnya makan bakso bersama keluarga, membeli makanan ringan dalam jumlah yang cukup banyak, dan sebagainya), membagikan uang tersebut kepada anak atau cucunya, membeli bunga, membeli pot bunga, membeli rak untuk tempat bunga, dan banyak lagi lainnya yang jauh dari tujuan penggunaan dana bantuan tersebut. Karena mereka bisa memenuhi kebutuhan primernya dengan uang yang mereka miliki sendiri. Jadi mereka menggunakan uang yang mereka dapat dari bantuan sosial selama Covid-19 ini untuk kebutuhan skundernya.

Dalam proses penyaluran bantuan sosial di Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang masih banyak terjadi kendala baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Usaha Pemerintah untuk membantu masyarakat selama pandemi covid-19 dengan menyalurkan bantuan sosial ini sudah cukup baik dan perlu diapresiasi. Namun dalam proses penyalurannya masih banyak kekurangan dari berbagai sisi, baik dari segi data yang kurang update pada awal pembagian sehingga terjadi polemik di masyarakat, KPM yang belum sepenuhnya sesuai sasaran, terlambatnya penyaluran, dan penggunaan dana bantuan sosial yang kurang sesuai dengan tujuan penyalurannya oleh sebagian KPM. Kendala-kendala tersebut tidak hanya terjadi di Gampong Sapik saja, tetapi sebagian daerah-daerah lain juga mengalami kendala yang sama. Masalah

terbesarnya adalah data penerima bantuan sosial yang digunakan tidak valid sehingga dalam penyalurannya masih belum tepat sasaran.

Penyaluran bantuan sosial ini juga menimbulkan dua sisi perilaku masyarakat Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang yaitu sisi positif dan negatif. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat menjadi terbantu ekonominya sehingga tidak harus terlalu sering bekerja ke luar rumah dan bisa mengurangi interaksi dengan masyarakat lain selama pandemi Covid-19 ini. Namun dengan adanya bantuan sosial ini juga membuat sebagian warga terlalu bergantung pada bantuan tersebut sehingga enggan mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

D. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial di Gampong Sapik dan Gampong Air Berudang masih belum tepat sasaran karena penerima belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran yang dituju dan penggunaan bantuan sosial oleh sebagian KPM tidak sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan tersebut. Berdasarkan informasi dari Tim TKP2K mengenai ketidakakuratan data yang digunakan untuk bantuan sosial selama Covid ini, harapan kami kepada pemerintah agar kedepannya dapat melakukan perbaikan dan update data kemiskinan secara berkala sehingga tidak terjadi ketidak tepat sasaran dan kepada KPM agar dapat menggunakan bantuan sosial tersebut untuk memenuhi kebutuhan primer. Kepala gampong dan jajarannya diharapkan dapat mempersiapkan instrumen pengontrol penggunaan dana bantuan sosial agar KPM menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan primer. Dengan demikian, penerima dan penggunaan bantuan sosial akan benar-benar sesuai dengan tujuan penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Mufida. 2020. "Polemik Pemberian Bantuan Sosial di Tengan Pandemi Covid-19", *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol.4 (h.164)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. "Situasi Terkini Perkembangan Novel CoronaVirus (Covid-19) Data Dilaporkan Sampai 13 November 2020". https://covid19.kemkes.go.id/download/Situasi_Terkini_141120.pdf (diakses pada 14 November 2020).
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/ HUK/ 2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial, Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/storage/document/Kepmensos%2520No.%252054-HUK-2020.pdf&ved=2ahUKEwiDuaaQpYLtAhUZU30KHXxSA_MQFjACegQIAxAB&usg=AOvVaw2LMEt0CqBDyv2-kIX25Sjp

Ketua Humas Gampok Sapik dan Bendahara Gampong Air Berudang.

Maman Suryaman dkk. 2020. "Covid-19 Pandemic and Home Online Learning System: Does it Affect the Quality of Pharmacy School Learning?" *Journal of Systematic Reviews in Pharmacy*. Vol. 11 (h. 524)

Nailul Mona. 2020. "Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek *Contagious* (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)". *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vol. 2 (h. 117)

Peter Garlans Sina. 2020. "Ekonomi Rumah Tangga di Era Pandemi Covid-19". *Journal of Management (SME's)*. Vol. 12 (h. 240)

Pimpinan dan Staf Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh.

Vincentius Gitiyarko. 2020. "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19" <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19> (diakses pada 14 November 2020).

Wildan Rahmansyah dkk. 2020. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol. 2 (h. 91).